

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara, antara lain untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan untuk menjamin agar manfaat pembangunan tersebut dapat diterima semua pihak adalah melalui upaya pemberdayaan potensi SDM daerah setempat, yaitu melalui otonomi daerah.

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi, dimana kepada daerah diserahkan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Melalui desentralisasi diharapkan kemampuan pemerintah daerah untuk manajemen pembangunan menjadi lebih lincah, akurat, dan tepat. Urusan pemerintahan yang diserahkan atau didistribusikan kepada daerah tersebut disertai pula dengan penyerahan atau transfer keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah.

Salah satu bentuk hubungan keuangan pusat dan daerah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana dana yang bersumber dari pendapatan APBN, dialokasikan/ditransfer kepada daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sehingga dapat

membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk satu periode anggaran (Abdul Halim, 2009:24). Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat ditinjau dari tingkat kenaikan aktiva ataupun penurunan utang yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah dalam periodetahun anggaran yang bersangkutan. Dalam pendapatan daerah di bagi menjadi 3 bagian, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang sah. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Dana Perimbangan terdiri dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Dana alokasi Khusus adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus di gunakan untuk kegiatan seperti di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana pemerintahan desa, sarana dan prasarana kawasan

perbatasan, kelautan dan perikanan, pertanian, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan prasarana dan prasarana daerah tertinggal, perdagangan, energi pedesaan, perumahan dan pemukiman, dan keselamatan transportasi darat.

Berikut ini adalah data target dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Ende tahun anggaran 2015-2018 :

Tabel 1.1.
Data Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Ende
Tahun 2015-2018

Uraian	2015			2016			2017			2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Dana Perimbangan	746,487,808,000	673,202,650,000	90%	957,410,718,400	870,028,688,409	90%	819,850,501,000	767,704,357,776	93%	836,342,630,000	814,101,126,524	97%
Dana Bagi Hasil	16,571,857,454	12,503,077,458	75%	15,242,070,000	13,930,179,540	91%	16,471,663,843	15,259,987,806	92%	12,385,536,000	10,112,258,771	81%
Dana Alokasi Umum	580,052,378,000	580,052,378,000	100%	621,695,004,000	621,695,004,000	100%	616,547,687,000	616,547,687,000	100%	621,873,578,000	621,873,578,000	100%
Dana Alokasi Khusus	166,435,430,000	65,579,180,000	39%	335,715,714,400	129,328,964,000	38%	203,302,814,000	178,617,375,000	87%	202,083,516,000	141,280,613,000	70%

Sumber: Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende, 2019

Berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa data jumlah target–realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Ende dari tahun 2015-2018 mengalami penurunan. Jumlah realisasi dana Alokasi Khusus kabupaten Ende dari tahun 2015-2018 belum mencapai jumlah target yang ditetapkan. Persentase sumbangan realisasi dana alokasi khusus ke dana perimbangan dari tahun 2015-2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, persentase sumbangan realisasi dana alokasi khusus ke dana perimbangan adalah sebesar 9%, di tahun 2016 persentase sumbangan realisasi dana alokasi khusus ke dana perimbangan adalah sebesar 15%, dan di tahun 2017 persentase sumbangan realisasi dana alokasi khusus ke dana perimbangan adalah sebesar 23% serta di tahun 2018 persentase sumbangan realisasi dana alokasi khusus ke dana perimbangan sebesar 17%.

Ketidaktercapaian jumlah target dana alokasi khusus kabupaten Ende yang sesuai dengan yang ditetapkan disebabkan oleh tidak maksimalnya pemanfaatan dana alokasi khusus. Hal ini terlihat dari adanya masalah yang muncul yaitu di tahun 2016 terjadi penyalahgunaan dana alokasi khusus di bidang pendidikan oleh pihak yang berwenang. Manfaat Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan sebenarnya dialokasikan untuk mendukung penuntasan program wajib belajar dasar 9 tahun yang bermutu dan merata. Kegiatan DAK Pendidikan diprioritaskan untuk melaksanakan rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan ruang perpustakaan, penyediaan buku referensi, pembangunan laboratorium, dan penyediaan peralatan

pendidikan. Kenyataanya, manfaat dana alokasi khusus ini tidak terealisasi dan dapat wujud nyatanya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. (

Berdasarkan masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul yakni **“Analisis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2015-2018 (Studi Kasus Pada Dinas Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya pemanfaatan Dana Alokasi Khusus di kabupaten Ende tahun anggaran 2015-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya pemanfaatan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Ende tahun anggaran 2015-2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Masukan untuk instansi dalam mengatasi kendala dan upaya yang perlu dilakukan terkait pemanfaatan Dana Alokasi Khusus.
2. Memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus.

3. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya pemanfaatan Dana Alokasi Khusus.
4. Menambah ilmu dan wawasan penulis tentang Dana Alokasi Khusus serta memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira.